

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peran negara sangat diperlukan dalam berbagai hal terutama dari aspek distribusi pendapatan, sehingga terjadinya pemerataan pada sumber-sumber ekonomi. Pemerintah berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan setiap warganya, sebagaimana fungsi pemerintah adalah mengatur, mengelola dan mendistribusikan seluruh kekayaan negara untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave (1959), salah satu fungsi utama pemerintah daerah adalah fungsi distribusi. Pemerintah adalah institusi yang dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari swasta, tiga hal yang relevan dengan keuangan negara adalah fungsi redistribusi, pendapatan, penyediaan barang publik dan perlindungan sosial (Gramlich, 1990).

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang baik untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, hal ini juga telah banyak juga dilaksanakan negara-negara didunia. Sebagaimana negara-negara lain telah mendapatkan perhatian yang cukup besar di banyak negara dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi pemerintah (Oates, 2005; OECD, 2006; 2009a; 2009 & (Antonia & Seiferling, 2014). Oleh karena itu pemerintah mengimplementasikan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dengan sistem desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) atau yang dikenal dengan alokasi dana transfer.

Tujuan dana transfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk membantu kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di daerah serta pemerataan (*equalization*). Adapun pelayanan yang dimaksud sebagaimana yang diamanatkan utamanya adalah terhadap kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Anand & Kanbur (1991) bahwa cara paling efektif pembangunan

manusia mengalir melalui belanja anggaran pemerintah, pusat atau daerah. Belanja publik adalah cara yang lebih efisien untuk memproduksi banyak layanan. Artinya pilihan pemerintah pusat untuk melaksanakan sistem belanja transfer adalah pilihan yang tepat untuk negara Indonesia saat ini. Sistem transfer dipandang baik untuk mempercepat pembangunan daerah, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan tau apa yang dibutuhkan masyarakat daerah, namun dalam perjalanannya sistem desentralisasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai persoalan dan kendala, hal ini masih perlu pengkajian lebih dalam lagi.

Sebagaimana tujuan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui belanja pemerintah daerah, sebagai tolak ukur tercapainya apa yang menjadi tujuan utama dana transfer dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia. Propinsi Jambi menempati urutan ke 5 dari peringkat IPM Provinsi di Pulau Sumatera dan peringkat ke-17 IPM Indonesia.

Senada dengan itu Hendriks (2014), transfer fiskal antar pemerintah bagian dari hubungan fiskal antar pemerintah negara manapun. Pemerintah nasional memanfaatkan transfer ke pemerintah daerah memungkinkan mereka untuk memberikan layanan mereka dijamin. Menurut Bird (2001) Transfer merupakan cara utama dimana negara-negara mencapai keseimbangan fiskal vertikal, yaitu memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran dari masing-masing tingkat pemerintahan sekitar *equal*. Kesenjangan fiskal tersebut dapat saja ditutup dengan cara lain yaitu dengan mentransfer pendapatan penggalangan kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan mentransfer tanggung jawab untuk pengeluaran pemerintah pusat, atau dengan mengurangi pengeluaran lokal atau meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Rao dan Singh (1998) alasan penting memberikan transfer timbul karena ketidakseimbangan fiskal atau ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran dari unit pemerintah yang berbeda.

Sebagian daerah berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar setiap tahunnya, Shah (2004) dari tahun ketahun

pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang lebih besar. Senada dengan Kuncoro (2004) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20 %, untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah (Budi Santosa, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar anggaran belanja daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat (APBN).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, bahwa dana transfer pemerintah pusat yang sudah ditransferkan kepada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2016 yang bersumber dari DAU diketahui bahwa jumlah DAU yang diterima Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Daerah yang memiliki pertumbuhan DAU tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertumbuhan rata-rata DAU Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun adalah 16,79 %, Tanjung Jabung Timur 14,84 %. Bila dikaitkan dengan angka capaian IPMnya masih dibawah kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang sama.

Disisi lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan alokasi DAU tertinggi dibawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 14,84 %, namun capaian angka IPMnya selama kurun waktu 7 tahun terakhir berada dibawah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi. Data ini mengindikasikan bahwa DAU relatif besar yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi belum sepenuhnya dapat mendorong meningkatkan pembangunan manusia, yang dibuktikan oleh daerah yang memiliki peningkatan DAU tertinggi namun peningkatan IPMnya tidak menjadi yang tertinggi sehingga hal ini tidak baik dibiarkan berlangsung lama dan perlu dikaji lebih jauh.

Bila di lihat dari sisi geografis ke 2 Kabupaten tersebut adalah kabupaten yang letaknya paling timur di Provinsi Jambi, tentunya hal ini menjadi tanda tanya? apa yang menyebabkan perbedaan mencolok pertumbuhan IPM antara wilayah Barat dan Timur di Provinsi Jambi.

Belanja daerah adalah instrumen penting dalam pemerintahan daerah, karena belanja daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bagi tercapainya pembangunan daerah. Oleh karena itu efektivitas dan efisiensi belanja daerah haruslah menjadi faktor utama, bila salah dalam membelanjakan anggaran daerah, maka akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan sosial. (*welfare society*).

Menurut Liesionis (2013), "*Unproductive expenditure hampers economic development and inhibits its growth*", menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal itu bisa disebabkan belanja pemerintah daerah lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai belanja pegawai daripada pengeluaran untuk membiayai pembangunan daerah sendiri.

Selanjutnya keberhasilan pembangunan daerah juga sangat ditentukan oleh sistem perencanaan program pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah "eksekutif dan legislatif" (Usman, 2003-14). Seberapa besar porsi anggaran yang dialokasikan untuk mendorong percepatan pembangunan manusia, akan tercermin dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Fenomena yang masih terjadi di Indonesia menurut Penelitian Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa; Fungsi dewan sebagai penyalur aspirasi rakyat tenggelam dibandingkan dengan kepentingan mereka untuk memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang" (Romli, et al, 2002). Senada apa yang ditulis (Usman, 2003) tentang hubungan Legislatif dan Eksekutif dimana sejak otonomi daerah bergulir telah membuat legislatif mempunyai peran sejajar dengan eksekutif, berbeda dengan sebelumnya DPRD terkesan berbeda dibawah bayang-bayang legislatif. Kekuatan legislatif cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi anggotanya, belum untuk menguatkan posisi rakyat melalui perbaikan pelayanan publik karena DPRD selalu menuntut kenaikan upah dan biaya lainnya, hal demikian *Impac* nya menjadikan alokasi anggaran kurang efektif dan tepat sasaran terhadap tujuan peningkatan pembangunan manusia yang di ukur melalui Indek Pembangunan Manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dewan tidak boleh tidak harus bekerja sama dengan eksekutif, sehubungan dengan kerjasama tersebut terdapat kesan kuat bahwa diantara keduanya (legislatif dan eksekutif) cenderung terdapat hubungan yang bersifat konflik. Kontrol dewan terhadap eksekutif kadang-kadang dinilai berebihan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah kerap kali menjadi alat “pemaksa” bagi tercapainya kehendak diri atau kelompok sendiri, namun dengan berjalannya waktu hubungan keduanya menjadi harmonis, berlanjut kepada kompromi (Usman, 2003).

Menurut Usman (2003) keharmonisan eksekutif dan legis latif dalam perjalannya hubungan antara legislatif dan eksekutif itu cenderung berkembang menjadi hubungan yang bersifat kolusif, konspiratif saling memanfaatkan satu sama lainnya. Fenomena mengatur belanja pemerintah daerah, sebagaimana pendapat (Usman, 2003) hampir terjadi dimana-mana disetiap daerah di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Jambi, sebagaimana kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 November 2017. mengindikasikan bahwa fenomena konspiratif dan kolusif di Indonesia benar adanya terutama dalam pembahasan anggaran untuk memuluskan APBD (www.serujambi.com).

Sejalan dengan pendapat Usman (2003) bahawa perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif menjadi isu yang nyata. Hal itu akan berdampak kepada tidak efektifnya pembiayaan program peningkatan pelayan publik didaerah dan terhadap pembangunan manusia yang merupakan amanah dan tujuan utama pemerintah.

Pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2007-2016 telah meningkat sebesar 14,67 % (sumber loka data). Bila dilihat dariangka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, patut diduga bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggidan kurang terkendali turut serta menghambat laju pembangunan manusia di indonesia, sehingga dana transfer yang tujuannya untuk pembangunan manusia disebagian daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Jumlah penduduk Prvinsi Jambi sampai dengan Tahun 2018 yaitu berjumlah 3.570.300 Jiwa, hal ini dapat dianggap cukup besar,

besarnya golongan umur anak-anak yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi (Arsyad, 2016). Hal itu disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat tidak sebanding dengan penyerapan lapangan pekerjaan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Beberapa peneliti menemukan bahwa variabel dana transfer mempengaruhi belanja daerah seperti penelitian Putra & Randa (2015), di Provinsi Bali, Pakosa (2004) dan Adi (2008) dan Soejoto (2015). Studi baru ini terhadap belanja kesehatan dan pendidikan di negara-negara OECD menemukan bahwa “belanja publik lebih memengaruhi pertumbuhan GDP dari pada belanja yang dikeluarkan swasta.” Ini konsisten dengan bukti-bukti nyata bahwa belanja publik pada kesehatan jauh lebih efisien, dalam batas-batas ekonomi, dan lebih efektif, dalam batas-batas tujuan penyediaan layanan kesehatan, dibandingkan belanja pihak swasta pada layanan kesehatan. Sederhananya, layanan kesehatan publik lebih efisien bagi perekonomian secara keseluruhan (Hall, 2010).

Temuan penelitian yang berbeda bahwa dana transfer tidak signifikan mempengaruhi belanja publik, beberapa studi lain (UNDP 2014, Paternostro, et.al, 2007) berfokus pada keterkaitan antara pengeluaran publik dan hasil. Dampak belanja publik terhadap hasil pembangunan ternyata sangat rendah atau hampir dapat diabaikan karena dua alasan. Pertama, mungkin ada substitusi antara belanja publik dan swasta dimana peningkatan penyediaan publik dapat memenuhi kebutuhan sektor swasta, oleh karena itu, memiliki efek marginal yang tidak berarti. Alasan kedua adalah ketidakefisienan institusional seperti lemahnya kapasitas dan kebocoran dalam belanja publik (Bhanumurthy, 2016).

Pembangunan suatu negara tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik semata, namun pembangunan manusia juga menjadi faktor penting untuk tercapainya kesejahteraan, karena manusia adalah agen yang menjadi pelaku ekonomi yang berkaitan dengan faktor produksi. Oleh karena itu pada tahun 1990, Program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) secara khusus telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (*Human*

Development Index/HDI) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah (Fattah & Muji, 2012).

Beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh para ekonom dan peneliti sebelumnya tentang kriteria Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Mengikuti jalan pikiran mereka tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti Anand dan Ravallion (1993), Jorgenson (1998), Romer dan Romer (1999), Jha (2000), Chakraborty (2003), Rana (2003), Liman (2004) UNDP (2004), NISER (2005), Anderson, de Ranzio dan Levy (2006) Montanao (2006), Bank Dunia (2007), dan (Edeme, 2014).

Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2016 diketahui bahwa daerah yang memiliki rata-rata angka capaian IPM tertinggi adalah Kota Jambi yaitu sebesar 76,14 dan daerah yang memiliki rata-rata IPM terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 61,88. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan di Provinsi Jambi yang dibuktikan oleh tingginya jarak IPM Kota dari daerah pedesaan.

Selanjutnya data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi (2017) pertumbuhan IPM Provinsi Jambi, untuk Kota Jambi yang merupakan Ibukota Provinsi hanya tumbuh 0,74 % dan Kota Sungai Penuh dengan pertumbuhannya 0,44 % di bawah Kabupaten lain dalam provinsi yang sama. Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Sungai Penuh sebagai satu-satunya kota diluar Ibukota provinsi semestinya pertumbuhan IPMnya lebih tinggi karena sarana dan prasarana kota lebih tersedia bila dibandingkan dengan kota kabupaten, akan lebih menjanjikan orang untuk tinggal di sebuah kota.

Berdasarkan perbandingan (*proxy*) data pertumbuhan DAU dan IPM kabupaten dan kota diatas, terindikasi bahwa peningkatan alokasi dana transfer yang besar ke daerah tidaklah selalu linier dengan meningkatnya pembangunan manusia di daerah, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan IPM periode 7 tahun terakhir periode 2010-2016 dimana angka pertumbuhan IPM yang tidak tumbuh signifikan di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Menurut BPS (2017) bahwa IPM provinsi Jambi 2010-2016 telah mengalami peningkatan rata-

rata 1,08 per tahun, meskipun menunjukkan angka yang meningkat, namun secara keseluruhan pembangunan manusia di Provinsi Jambi masih tetap dalam katagori yang sama (*stagnan*) bersatatus “**sedang**” sejak tahun 2010. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa penigkatan alokasi dana transfer setiap tahunnya tidak signifikan atau berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jambi. Sejalan dengan bukti-bukti empiris Internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya (Mello & Barenstrein, 2001).

Penelitian Afirman (2011) temuannya bahwa dana transfer yang besar ternyata tidak menjamin pelayanan publik yang lebih baik, hal ini terlihat dari beberapa daerah yang mendapatkan alokasi DAU yang cukup besar tetapi peningkatan IPMnya masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sesuai dengan kondisi daerah sampel, maka besaran PAD yang rendah ternyata seiring dengan efektivitas belanja untuk publik masih belum optimal. Sampel penelitiannya di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Solok yang memiliki alokasi DAU yang cukup besar tetapi memiliki PAD yang kecil, masih belum mencapai peningkatan yang lebih baik dari daerah-daerah pembandingnya.

Selanjutnya penelitian yang menemukan bahwa salah datu variabel belanja daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM yaitu Penelitian Maryani (2012) di Jawa Tengah, menyimpulkan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM, namun meskipun berpengaruh positifbelanja pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM, hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya maupun dari alokasi.

Penelitan Sanggelorang dkk (2015) menyimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif yaitu menigkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel belanja pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar - 0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap IPM. Penelitian lain yang

menunjukkan hubungan yang negatif antara belanja publik dan hasil baik bidang kesehatan maupun pendidikan karena perbedaan dalam efektivitas pembelanjaan, salah satunya adalah tingkat korupsi yang tinggi. (De La Croix & Delavallade, 2006; Gupta et al 1989; Pritchett 1996 & Bhanurmurty dkk, 2016).

Penelitian Edeme (2014) menganalisis Pengaruh Belanja Publik Terhadap Pembangunan Manusia di Negeria, dengan menggunakan data dari 20 Negara Bagian untuk periode 1999-2012. Variabel penelitiannya adalah : Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pembangunan Pedesaan, Energi, Perlindungan Lingkungan, Perumahan dan Sumber Daya Air *Portable*. Kesimpulan penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan dampak tertinggi pada pembangunan manusia, diikuti oleh kesehatan, pertanian, Pembangunan Pedesaan dan Energi, Perlindungan Lingkungan, Perumahan dan Sumber Daya Air dalam urutan yang menurun. Koefisien spesifik mereka, meskipun positif, secara statistik tidak signifikan; ini merupakan sebuah indikasi bahwa pengeluaran publik tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan manusia. Dari data panel tentang hubungan antara belanja modal dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa belanja modal memiliki korelasi positif dan negatif dengan perkembangan manusia diseluruh negara bagian dan waktu. Terutama Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pembangunan Pedesaan, perlindungan Lingkungan dan Pengeluaran Sumber Daya Air memperbaiki pembangunan manusia, meski tidak kuat.

Pada sisi lain belanja modal berulang untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan dan pengeluaran sumber daya air, modal energi dan belanja perumahan cenderung menurunkan pembangunan manusia. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran semacam itu dapat membantu mengembangkan infrastruktur, namun tidak membantu meningkatkan kemampuan yang mendorong perkembangan manusia.

Berdasarkan data-data dan studi literatur yang telah di paparkan diatas, bahwa masih terdapat permasalahan dan hasil yang berbeda tentang pengaruh dana transfer melalui belanja daerah terhadap pembangunan manusia ada yang berpengaruh positif dan signifikan ada pula yang berpengaruh tapi tidak

signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih dalam menggali bukti empiris tentang efek alokasi dana transfer melalui belanja daerah apakah berdampak positif atau negatif dalam mendorong pembangunan manusia yaitu dengan judul “**Analisis Pengaruh Alokasi Dana Transfer terhadap Belanja Daerah dan Pembangunan Manusia**”.

1.2. Perumusan Masalah.

Tren peningkatan alokasi dana transfer ke daerah Provinsi Jambi dari tahun ketahun menunjukkan angka yang meningkat, tentunya secara langsung akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan dalam anggaran belanja daerah semestinya diikuti pula hal yang sama oleh peningkatan angka IPM, karena salah tujuan dana transfer ke daerah adalah untuk penguatan kapasitas fiskal daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah, namun fakta menunjukkan hasil yang berbeda efek dana transfer melalui belanja daerah cenderung tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data Indek Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2016 diketahui bahwa daerah yang memiliki rata-rata angka capaian IPM tertinggi adalah Kota Jambi yaitu sebesar 76,14 dan daerah yang memiliki rata-rata IPM terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 61,88. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan di Provinsi Jambi yang dibuktikan oleh tingginya jarak IPM Kota dari daerah pedesaan.

Selanjutnya berdasarkan data rilis BPS Provinsi Jambi (2017) pertumbuhan IPM Provinsi Jambi, untuk Kota Jambi yang merupakan Ibukota Provinsi hanya tumbuh 0,74 % dan Kota Sungai Penuh dengan pertumbuhannya 0,44 % di bawah Kabupaten lain dalam provinsi yang sama. Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Sungai Penuh sebagai satu-satunya kota diluar Ibukota provinsi semestinya pertumbuhan IPMnya jauh

lebih tinggi karena sarana dan prasarana infrastruktur kota lebih tersedia bila dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota, karena lebih menjanjikan orang untuk tinggal atau bermukim di sebuah kota.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, bahwa dana transfer pemerintah pusat yang sudah di transferkan kepada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2016 bersumber dari DAU diketahui mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Sebagai sampel daerah yang memiliki pertumbuhan DAU tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertumbuhan rata-rata DAU Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun adalah 16,79 %, Tanjung Jabung Timur 14,84 %. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang besar dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah masing-masing. Bila dikaitkan dengan angka capaian IPMnya kedua (2) kabupaten tersebut yaitu diangka 62 dan 66 poin, masih dibawah kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang sama.

Disisi lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan alokasi DAU tertinggi dalam provinsi Jambi dibawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 14,84 %, namun capaian angka IPMnya selama kurun waktu 7 tahun terakhir masih tetap dibawah Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Jambi. Data ini mengindikasikan bahwa DAU relatif besar yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Jambi belum sepenuhnya dapat mendorong meningkatkan pembangunan manusia, yang dibuktikan oleh daerah yang memiliki peningkatan DAU tertinggi namun peningkatan IPM nya tidaklah menjadi yang tertinggi.

Bila di lihat dari sisi geografis ke 2 Kabupaten tersebut adalah kabupaten yang letaknya paling timur di Provinsi Jambi, tentunya hal ini menjadi tanda tanya, apa penyebab terjadinya perbedaan yang mencolok pertumbuhan IPM antara wilayah Barat dan Timur di Provinsi Jambi. Perbandingan data pertumbuhan DAU dan IPM kabupaten dan kota diatas, terindikasi bahwa peningkatan alokasi dana transfer yang besar ke daerah tidaklah selalu linier dengan meningkatnya pembangunan manusia dibeberapa Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jambi. Menurut BPS (2017) bahwa IPM provinsi Jambi 2010-2016 telah mengalami peningkatan rata-rata 1,08 per tahun, meskipun menunjukkan angka yang meningkat, namun secara keseluruhan (*general*) pembangunan manusia di Provinsi Jambi masih dalam katagori yang sama stagnan bersatatus “sedang”.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi
2. Bagaimana pengaruh belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi

1.3. Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas akan dijawab dalam penelitian ini. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin mempelajari pengaruh dana transfer terhadap pembangunan manusia melalui alokasi belanja daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, pertumbuhan penduduk terhadap belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
2. Pengaruh belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah :

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca untuk memahami lebih mendalam tentang pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lebih lanjut yang akan melakukan penelitian tentang belanja daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Pemerintah Pusat.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan serta pertimbangan penganggaran dana transfer terhadap daerah-daerah di Indonesia yang tidak efisien dalam menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari dana transfer (APBN), sebagai tolak ukur salah satunya adalah peningkatan pembangunan manusia, dilihat dari pertumbuhan IPM daerah Kabupaten dan Kota.

c. Bagi Pemerintah daerah.

Dapat dijadikan pertimbangan bagi pejabat daerah, dalam penggunaan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat, untuk lebih memperhatikan determinasi yang dapat mengoptimalkan Pembangunan Manusia dibuktikan oleh signifikan peningkatan IPM daerah setiap tahunnya.

1.5. Hal yang Baru dalam Penelitian ini

Penelitian ini adalah pengembangan dari Penelitian Edeme (2014), menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor publik terhadap Pembangunan Manusia di Negeria, dan penelitian Fattah dan Muji, (2012), menganalisis “Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” di Sulawesi Utara.

Hal yang baru yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya untuk studi kasus di Indonesia, diupayakan untuk diteliti pada penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh alokasi dana transfer terhadap pembangunan manusia melalui belanja daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variabel **Ekonomi sebagai variabel belanja daerah dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel eksogen** yang mempengaruhi pembangunan manusia, dan selanjutnya menganalisis variabel dana transfer: X1

(DAU), X2 (DAK), X3 (DBH), X4 (PAD) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah (Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi).

Selanjutnya variabel jumlah penduduk diregresi terhadap variabel belanja daerah dan regresi secara bersama-sama terhadap variabel pembangunan manusia, yang merupakan variabel dependen (Y), diukur dengan Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Perkapita.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh dana transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD terhadap belanja daerah (Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi) dan pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan manusia sebanyak 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota dan 9 Kabupaten. Sedangkan periode analisis mencakup 8 Tahun Anggaran yaitu periode 2010-2017.

